

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhamad Iqbal

e-mail : balliq85@gmail.com

Iseu Anggraeni

e-mail : Ise.maheza@gmail.com

Sendy Setyana

e-mail : sendysetyana17@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan populasi dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan sampel yang diambil yaitu Laporan Realisasi Anggaran periode 2014 - 2021 Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien korelasi person, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hasil tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002. Dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hasil tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,361. secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi 0.006.

Kata Kunci : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Negara yang bersumber dari sektor pajak dari tahun ke tahun dapat memperlihatkan peranannya atas pembiayaan dalam pembangunan nasional yang sering disebut wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan Kepala Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. | Muhamad Iqbal, Iseu Anggraeni, Sedy Setyana.

daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Pendapatan pajak ini merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang sangat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besar kecilnya penerimaan PAD tidak terlepas dari jumlah penerimaan pajak daerah yang diterima.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sebuah indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal yang bisa diukur adalah semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Hal ini selaras dengan pendapat Mahmudi (2015:34) yang mengatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah akan berdampak pada peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Di samping rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Kriteria yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Karena saat ini masih banyak para wajib pajak yang acuh dalam membayar pajak itu sendiri dengan alasan karena covid-19 padahal sektor usaha apapun saat ini sudah mulai berjalan kembali dan berjalan normal, namun pajak dan retribusi kepada pemerintah belum maksimal. Pada saat ini peran Pemerintah perlu ditegaskan lagi kepada para wajib pajak agar dapat membayar pajak serta retribusi sesuai yang telah ditentukan. Begitupun di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan daerah otonom di Jawa Barat, Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting dan dibutuhkan untuk membiayai seluruh anggaran kegiatan belanja pemerintahan daerah tersebut. Kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang telah di atur dalam perundang-undangan tadi menuntut pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dapat mendatangkan pemasukan guna pemenuhan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari seluruh Sektor yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa masih kurang optimalnya pemungutan dari sumber-sumber PAD itu sendiri, sehingga menyebabkan realisasi PAD yang ada tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE TAHUN ANGGARAN 2014-2021** ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penulis melaksanakan penelitian yaitu pada Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat yang berlokasi di Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Mekarsari-Ngamprah, Bandung Barat. Waktu pelaksanaan Penelitian skripsi ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah di daerah dan memungkinkan PAD nantinya digunakan untuk membangun dan meningkatkan

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. | Muhamad Iqbal, Iseu Anggraeni, Sedy Setyana.

kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah Indikator-indikator Pajak Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, dan
11. Bea perolelah Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Yoyo Sudaryo (2017:108) adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakann yang mendapat prestasi kembalinya sacara langsung. Selain itu retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oeh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah berasal juga dari retribusi daerah. Namun untuk retribusi tiap daerahnya memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*.

Berikut adalah Indikator-indikator Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

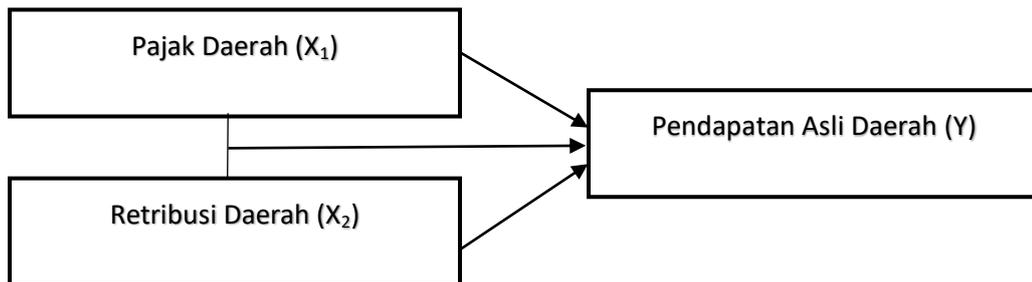
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah dikemukakan oleh Siregar Baldric (2017:23). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah Indikator-indikator Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan skema paradigma penelitian berikut ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Terdapat Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dikemukakan oleh Sugiyono (2017:2).

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2017:2) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

3.2.1.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2017:84) adalah bagian dari keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi luas dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga maupun dana, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kemudian kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, karenanya sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representatif* (mewakili).

Sampel dalam penelitian ini ialah berupa data Laporan Realisasi Anggaran daerah Kabupaten Bandung Barat. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan Teknik *sampling purposive* yang mana menurut Sugiyono (2017:85) *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan (Kriteria) tertentu. Berikut adalah pertimbangan (kriteria) yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

1. Sampel yang dipergunakan merupakan data tentang pendapatan daerah (Laporan Realisasi Anggaran / LRA).
2. Sampel yang digunakan adalah data yang berturut-turut dari tahun 2014-2021.

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linear berganda ditujukan untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linear ganda dapat dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal 2.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,339	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:278)

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Ghozali (2016:98)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a) Uji t (Parsial)

Uji-t statistik digunakan untuk melihat signifikansi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan dengan t_{tabel} .

Setelah menghitung t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak.
2. Jika $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima.
3. Apabila menggunakan program Software SPSS, Jika nilai sig. $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b) Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama – sama terhadap variabel terikat apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima.
3. Apabila menggunakan program *Software SPSS*, Jika nilai sig. $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. | Muhamad Iqbal, Iseu Anggraeni, Sedy Setyana.

(Constant)	23.360	84.611		.276	.794
1 Pajak Daerah	1.629	.290	1.001	5.625	.002
Retribusi Daerah	-3.068	3.052	-1.179	-1.005	.361

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah kembali

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 23,360 + 1,629 - 3,068$$

Keterangan:

1. Konstanta dengan nilai 23,360 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka Pendapatan Asli Daerah sebesar 23,360
2. b_1 sebesar 1,629 hasilnya Positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,629 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. b_2 sebesar -3,068 hasilnya negatif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1% akan diikuti oleh Penurunan Pendapatan Asli sebesar -3,068 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 4.2
Hasil Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*
Correlations

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah	Pearson Correlation	1	.450	.921**
	Sig. (2-tailed)		.263	.001
	N	8	8	8
Retribusi Daerah	Pearson Correlation	.450	1	.272
	Sig. (2-tailed)	.263		.515
	N	8	8	8
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	.921**	.272	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.515	
	N	8	8	8

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data yang diolah kembali

Tabel 4.3
Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.935 ^a	.874	.823	51.26738

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi di atas, menunjukkan bahwa:

- a) Korelasi antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial adalah sebesar 0,450. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,40 – 0,599 mempunyai hubungan yang sedang. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah akan diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Korelasi antara Arus Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial adalah sebesar 0,921. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Daerah akan diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c) Korelasi ganda adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,935. Berdasarkan tabel kriteria korelasi termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000, mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena nilainya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1.3 Koefisien Determinasi

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R-Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 ^a	.874	.823	51.26738	2.589

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel di atas, diketahui nilai *R-Square* sebesar 0,874. Nilai *R Square* menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,874 (87,4%). Artinya, Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 87,4%.

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.4.1. Uji Signifikan Uji t (Parsial)

Tabel 4.5
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23.360	84.611		.276	.794
1 Pajak Daerah	1.629	.290	1.001	5.625	.002
Retribusi Daerah	-3.068	3.052	-.179	-1.005	.361

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

a. Uji t (Parsial) Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil uji-t yang telah didapat yaitu pada tabel 4.5 serta hasil perhitungan di atas, nilai t_{hitung} untuk Pajak Daerah (X_1) adalah 5,625 pada t_{tabel} dengan dk 5 ($n-3 = 8-3$) dan taraf signifikansi 0.05 diperoleh 2,570 (lihat t_{tabel} pada lampiran). $5,625 > 2,570$ Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. | Muhamad Iqbal, Iseu Anggraeni, Sedy Setyana.

Kemudian pada kolom sig. di atas (tabel 4.5) dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji-t sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

b. Uji t (Parsial) Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil uji-t yang telah didapat yaitu pada tabel 4.5 serta hasil perhitungan di atas, nilai t_{hitung} untuk Retribusi Daerah (X_2) adalah -1,005, pada t_{tabel} dengan dk 5 ($n-3 = 8-3$) dan taraf signifikansi 0.05 diperoleh 2,570 (lihat t_{tabel} pada lampiran). $-1,005 < 2,570$ Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian pada kolom sig. di atas (tabel 4.5) dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji-t sebesar 0,361 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil bahwa Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.1.4.2 Uji Signifikan Uji F (Simultan)

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Uji F
Pengaruh X_1 dan X_2 Terhadap Y

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	90829.778	2	45414.889	17.279	.006 ^b
Residual	13141.722	5	2628.344		
Total	103971.500	7			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Dari tabel 4.18 dan hasil perhitungan di atas nilai F_{hitung} untuk adalah 17,279 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 5 dan regresi 2 dengan taraf signifikansi 0.05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 5,79 (lihat F_{tabel} pada lampiran). Sehingga $17,279 > 5,79$, karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian pada kolom ANOVA^a di atas (tabel 4.18) dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji-F sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widhi Sunardika yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung periode 2009 – 2015 dimana Pajak Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli di Kabupaten Bandung. Menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah mengemukakan Penggunaan uang pajak

meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan berbagai proyek pembangunan. Penerimaan pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak daerah dengan sifatnya yang wajib dan memaksa diharapkan dapat berkontribusi secara penuh sehingga dapat menjadi sumber penyumbang besar bagi PAD.

Berdasarkan Hasil penelitian dapat menggambarkan bahwa Pajak daerah signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat namun belum optimal sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat lebih tegas lagi terhadap masyarakat dalam pungutan pajak sehingga meminimalisir terjadinya tunggakan pajak dengan cara melakukan peningkatan SDM untuk ahli penagihan, pemeriksaan dalam pemungutan perpajakan yang baik serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan (misalnya : e-SKPD, e-Payment).

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widhi Sunardika yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung periode 2009 – 2015 dimana Retribusi Daerah tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli di Kabupaten Bandung. Menurut Abdul Halim Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan PAD. Jika Jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka PAD juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil penelitian hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah belum memenuhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan kecilnya penerimaan retribusi yang di akibatkan karena tidak menyebarnya pungutan retribusi di Kabupanten Bandung Barat seperti di beberapa tempat wisata, pasar dan sebagainya belum diterapkan sistem digitalisasi parkir padahal ditempat wisata maupun pasar berpotensi tinggi dalam penerimaan retribusi contohnya retribusi parkir dimana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat Meningkatkan pemungutan Retribusi Daerah terhadap masyarakat dengan lebih optimal dengan cara, meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi bisa dengan memanfaatkan teknologi kemudian melakukan peningkatan dalam pendataan wajib retribusi.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data, bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widhi Sunardika yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bandung periode 2009 – 2015 dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli di Kabupaten Bandung. Menurut Mardiasmo Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. | Muhamad Iqbal, Iseu Anggraeni, Sedy Setyana.

Demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut benar-benar saling melengkapi dan tidak bisa sendiri-sendiri dalam menentukan naiknya Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini belum dapat memenuhi Pendapatan Asli Daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan fokus pada akses infrastruktur pada jalan menuju tempat wisata sehingga menarik lebih tinggi minat masyarakat. Kemudian Pemerintah Daerah juga diharapkan agar dapat meningkatkan SDM untuk ahli penagihan, pemeriksaan dalam pemungutan perpajakan yang baik serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan (misalnya : e-SKPD, e-Payment). Serta meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi bisa dengan memanfaatkan teknologi kemudian melakukan peningkatan dalam pendataan wajib retribusi.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan pula oleh nilai koefisien korelasi yang memiliki hubungan yang positif dan sedang. Adapun hasil uji-t bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan Pajak Daerah mampu meningkatkan Kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
2. Retribusi Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini ditunjukkan pula oleh nilai koefisien korelasi yang memiliki hubungan yang negatif dan sangat kuat. Adapun hasil uji-t bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, serta nilai probabilitas lebih besar dari 0.05.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahwa hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut benar-benar saling melengkapi dan tidak bisa sendiri-sendiri dalam menentukan naiknya Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat walaupun secara parsial pajak daerah pengaruhnya positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa semakin baik pajak daerah dan Retribusi Daerah secara simultan maka semakin baik pula Pendapatan Asli Daerah.

5.2. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1, Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Berikut adalah saran dari penulis bagi Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah periode 2014 - 2021 mengalami fluktuasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat lebih tegas lagi terhadap masyarakat dalam pungutan pajak sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran pajak dengan cara melakukan peningkatan SDM untuk ahli penagihan, pemeriksaan dalam pemungutan perpajakan yang baik serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan (misalnya : e-SKPD, e-Payment).
- b. Retribusi Daerah periode 2014 – 2021 mengalami fluktuasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan Meningkatkan pemungutan Retribusi

Daerah terhadap masyarakat dengan lebih optimal dengan cara, meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi bisa dengan memanfaatkan teknologi kemudian melakukan peningkatan dalam pendataan wajib retribusi.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan fokus pada akses infrastruktur pada jalan menuju tempat wisata sehingga menarik lebih tinggi minat masyarakat.
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat mengoptimalkan Pajak Daerah dimana dilihat di Bandung Barat terdapat banyak Industri yang besar seharusnya dapat membuat pendapatan Pajak Daerah lebih besar
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berikut adalah saran dari penulis bagi Peneliti selanjutnya berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas dan memperbanyak sampel dan populasi tidak hanya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tapi seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia.
- b. Menambah variabel – variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Seperti Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dan sebagainya.
- c. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah periode waktu yang lebih lama agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh Kabupaten yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA:

- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, Badric. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Sudaryo, Yoyo. 2017. Keuangan Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R%D. Bandung: Alfabeta.
- Iqbal Muhammad dan Widhi sunardika. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015*. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.9.No.1.
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”. Peraturan.bpk.go.id
- “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”. Peraturan.bpk.go.id

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. | Muhamad Iqbal, Iseu Anggraeni, Sendy Setyana.